



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KAB. LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas PP dan KB Tentang Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2023

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capain Renstra SKPD	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH	56
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.3 Program dan Kegiatan	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB V PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Kinerja Dinas PP dan KB Tahun 2021	8
Tabel 2.2	(TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra	12
Tabel 2.2	(TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel 2.4	(TC.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
Tabel 2.5	(TC.32)Usulan Program dan Kegiatan	48
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	58
Tabel 3.2	(TC.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	64
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	77

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridho-Nya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 tersusun, guna memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang di harapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini di dasarkan pada identifikasi faktor-faktor keberhasilan (*critical succes factor*) yang ditetapkan. Sebagai amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 7 dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang di susun dengan berpedoman Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Demikian semoga dengan tersusunnya rencana kerja ini dapat bermanfaat guna menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



dr. LIDIA DEWI

— Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19770303 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Hi. Mochtar (Komplek Pemda Lampung Tengah) Gunung Sugih
Telp. (0725) 529878

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 800/18 /D.a.VI.09/I/2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) memuat arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Bahwa rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi
- h. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2021;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- m. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024.
- Kesatu : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah merupakan Penjabaran Program dan Kegiatan Tahun 2024;
- Ketiga : Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih,
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



dr. LIDIA DEWI

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19770303 200501 2 016

Tembusan :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Tengah.
4. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi di berbagai bidang, kebijakan pemerintah dalam menetapkan target-target pembangunan, yang dahulunya dituangkan dalam bentuk rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan bercirikan Top Down, saat ini dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan, yang dapat menjamin keselarasan dan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah wajib membuat Dokumen RPJP, RPJM dan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah. Selanjutnya, untuk masing-masing Organisasi perangkat daerah (OPD) harus membuat RPJM yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) OPD, yaitu Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) OPD, yaitu Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun.

Lingkup tugas kerja perangkat daerah baru ini telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Secara spesifik, wewenang pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sementara tugas dan fungsinya dalam beberapa program dan kegiatan sebagaimana RPJPM Kabupaten Lampung Tengah antara lain, Program Keluarga Berencana, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga, Program Promosi Kesehatan Ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan, Program Penyiapan Tenaga Pendamping dan Kader Kelompok Bina Keluarga, Program Modu-Padu, Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Pengendalian Penduduk.

Rencana Kerja Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Lampung Tengah pada tahun 2024, yaitu upaya akselerasi pembangunan yang sinergis, terwujudnya masyarakat Lampung Tengah yang adil dan sejahtera melalui Akselerasi Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan mengusung suatu komitmen yang kuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program kegiatan realistis dan aplikatif sesuai kondisi daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan memanfaatkan seoptimal mungkin suatu pengetahuan aspiratif yang memperhitungkan suatu kondisi daerah, peluang dan kendala yang ada, atau mungkin yang akan timbul dimasa yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 04).
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024.
2. Tujuan dari penyusunan Renja OPD adalah :
 - a. Secara umum untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan.

- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan serta pembiayaannya sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Bab ini menyajikan informasi yang mencakup tentang (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, (2) Analisa Kinerja Pelayanan OPD, (3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, (4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan (5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini menggambarkan informasi tentang (1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, (2) Tujuan dan Sasaran Renja OPD, (3) Program dan Kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam Bab ini memuat Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan OPD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran, dituangkan dalam Rencana Strategik Perangkat Daerah. Sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan, sedangkan kegiatan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Setiap sasaran dan indikatornya mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya.

Secara rinci, capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Review hasil evaluasi ini, mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD dan realisasi APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	DANA			
			REALISASI (Rp)	(%)	SISA (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.926.500	10.926.400	100	100	0
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.386.517.830	3.370.000.988	100	16.516.842	0
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	454.682.100	454.659.100	100	23.000	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	970.000	970.000	100	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.939.750	51.739.750	98	1.200.000	2
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.124.000	3.124.000	100	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.013.050	11.013.050	100	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.080.000	24.800.000	99	280.000	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.394.000	86.394.000	100	-	-

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	41.983.400	100	16.600	0
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	289.010.000	287.828.700	100	1.181.300	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.650.000	11.293.000	97	357.000	3
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.950.000	22.950.000	100	-	-
II	Program Pengendalian Penduduk					
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	33.690.000	33.540.000	100	150.000	0
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	37.175.000	37.175.000	100	-	-
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	68.000.000	-	-	68.000.000	100
III	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.500	4.375.000	100	500	0

	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.000.000	15.000.000	100	-	-
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	65.640.000	65.640.000	100	-	-
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	298.200.000	278.120.000	93	20.080.000	7
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.411.054.000	1.237.112.322	88	173.941.678	12
	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000	100	-	-
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.229.211.250	1.224.932.700	100	4.278.550	0
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.000.000	29.950.000	100	50.000	0
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.492.800.000	1.492.800.000	100	-	-
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.782.750	13.780.000	100	2.750	0
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	927.107.500	791.559.800	85	135.547.700	15

	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	29.260.600	28.514.240	97	746.360	3
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.400.000	29.400.000	100	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	741.750.000	680.558.000	92	61.192.000	8
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	30.000.000	30.000.000	100	-	-
IV	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	5.472.320.000	725.370.000	13	4.746.950.000	87
Jumlah		16.366.023.830	11.135.509.450	68	5.230.514.380	32

Dan Tabel 2.2 (TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun (tahun berjalan)* Kabupaten Lampung Tengah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	100%	99.80%	80%	80%	100	80%		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai Peraturan perundang- undangan yang berlaku	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen		

2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25.000.000	4.882.500	10.926.500	10.926.500	100	4.882.500	20.691.500	8,28
2	14	01	2.01	XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun	5.000.000	-	0	0	0	0	-	0,00
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%			
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitasi pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	3.015.014.462	2.909.346.836	3.386.517.830	3.370.000.988	99,51	3.529.032.122	9.808.379.946	3,2
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	454.682.100	452.162.015	493.425.500	440.524.876	89,28	440.524.876	1.333.211.767	2,93
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun tepat waktu	25.000.000	0	0	0	0	0	-	0,00

2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	100%	100%						
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	100,00	970.000	5.230.000	0,70
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60.000.000	13.860.000	78.952.000	78.662.000	100	36.752.000	129.274.000	2,15
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15.000.000	1.854.500	1.854.500	1.854.500	100	3.124.000	6.833.000	0
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	30.000.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	100	11.013.050	20.333.050	1
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ketersediaan kebutuhan media masa	65.000.000	27.480.000	27.480.000	27.480.000	100	25.080.000	80.040.000	1
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi PD	150.000.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	100	86.394.000	128.794.000	1
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan kebutuhan listrik dan Internet kantor	55.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	42.000.000	102.000.000	2

2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	124 unit	109 unit	109 unit	109 unit	109 unit	109 unit		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang mendapat pemeliharaan	289.010.000	277.033.214	246.510.000	246.510.000	100	289.010.000	812.553.214	2,81
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	11.650.000	7.200.000	20.000.000	20.000.000	100	14.500.000	41.700.000	3,58
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	60.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	22.950.000	62.950.000	1,05
2	14	01	XX		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaiannya	5 pegawai	0	0	0	0	0	0	0
2	14	01	XX	XX	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	27.500.000	-	0	0	0	0	0	0
2	14	XX	XX		Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifik Fertility rate/ASFR 15-19)	20%							
						Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21%							

						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	69.44%							
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	69.44%							
2	14	XX	XX		Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten yang disusun	1 perda							
						Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	2 perda							
						Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	50 dokumen kerjasama							

2	14	XX	XX	XX	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan	80.000.000	64.812.500	65.397.800	64.812.500	99	-	129.625.000	1,62
2	14	XX	XX		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-							
2	14	XX	XX	XX	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah dokumen yang disusun	80.000.000	52.507.350	53.083.800	52.507.350	99	-	105.014.700	1,31
2	14	XX	XX	XX	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah kecamatan yang memperbaharui data operasional program KB (up to date)	80.000.000	66.755.610	66.790.460	66.755.610	100	-	133.511.220	1,67
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	75%							
						Persentase fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%							
						Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	73%							

						Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	6.84%							
						Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	39.92%							
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%							
						Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	91.23%							
						Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	83%							
						Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	0.46%							
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	-							
						Jumlah kelompok kerja KKBPK Kabupaten yang terbentuk	-							

2	14	03	2.01	XX	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah rakor program KKBPK tingkat Kabupaten yang dilaksanakan	80.000.000	44.221.200	32.688.950	28.469.500	87	-	72.690.700	0,91
2	14	03	2.01	CC	Promosi dan KIE program KKBPK melalui massa, cetak dan elektronik serta media luar ruangan	Jumlah media promosi yang digunakan	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah pengadaan sarana balai	1.411.054.000	979.266.844	1.233.455.000	979.266.844	79	1.411.054.000	3.369.587.688	2,39
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%							
						Presentase penyuluh KB yang telah mendapat dukungan sarana dan prasarana	100%							
2	14	03	2.02	02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah PLKB yang terlayani	10.468.452.000	3.200.729.252	6.437.848.000	5.188.524.665	81	10.468.452.000	18.857.705.917	1,80

2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPk untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Jumlah PLKB	50.000.000	28.469.500	38.237.950	37.698.600	99	30.000.000	96.168.100	1,92
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	-							
2	14	03	2.03		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP yang terlayani	150.000.000	163.644.840	660.498.340	645.433.291	98	-	809.078.131	5,39
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah retensi DAK yang terbayarkan	74.871.360	-	72.180.089	72.180.089	100	29.260.600	101.440.689	1,35
2	14	03	2.03		Peningkatan kesertaan KB pria	Jumlah cakupan MOP yang terpenuhi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-

2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%								
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu kampung KB	Jumlah kampung yang mendapat pembinaan	50.000.000	-	41.303.350	30.595.000	1	30.000.000	60.595.000	1,21	
2	14	XX			Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%								
						Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	98.34%								
						Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	96.22%								
						Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	98.27%								
						Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%								

						Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	92.31%							
						Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	92.25%							
2	14	XX	XX		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%							
2	14	XX	XX	XX	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/UPPKS	Jumlah KIT Siap Nikah yang disediakan	50.000.000	58.103.275	59.999.075	58.103.275	97	-	116.206.550	2,32

2	14	XX	XX	XX	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah PIK Remaja yang dibina	30.000.000	21.775.000	49.070.000	42.066.400	86	-	63.841.400	2,13
						Jumlah kelompok balita yang dibina	40.000.000	66.739.445	73.795.000	66.739.445	90	-	133.478.890	3,34
						Jumlah Kelompok PPKS yang dibina	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2	14	XX	XX	XX	Orientasi/Pelatih an Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah kader yang dibina	130.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2	14	XX	XX	XX	Orientasi/ pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah pendamping yang dilatih/ dibina	130.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, setiap tahunnya menggunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun untuk kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 berjumlah 30 sub kegiatan, 11 kegiatan dari 4 program. Pencapaian kinerja program sebesar (68%).

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.3 (TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Total Fertility Rate (TFR)			2,12	2,09	2,06	2,03	2,41	-	2,06	2,03	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			72,27	72,65	73,03	73,41		-	73,03	73,41	
3	Persentase ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)			8,08	7,78	7,84	7,18		-	7,84	7,18	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, tentunya memerlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengelola pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melalui tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam beberapa kegiatan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan luar yang secara signifikan dapat mempengaruhi. Potensi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, harus dikelola melalui suatu sarana yang memadai baik dari segi pengaturan, institusi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) nya maupun dukungan biaya.

Beberapa kekuatan pendorong dan penghambat dari dalam maupun pengaruh luar yang terjadi pada saat ini secara umum dapat dikelompokkan seperti berikut ini:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

1) Bidang Pengendalian Penduduk

- a. Masalah utama yang dihadapi pada sektor pengendalian penduduk adalah terbatasnya kualitas Sumber daya manusia dalam merencanakan program dan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk.
- b. Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pada Bidang Pengendalian Penduduk.
- d. Perlunya pemutakhiran data dan informasi yang akurat setiap tahun.

2) Bidang Keluarga Berencana

- a. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah, hal ini terbukti sampai saat ini tinggal 63 tenaga penyuluh yang seharusnya 154 orang dimana setidaknya satu penyuluh membina 2 kampung.
- b. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB, hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB.

- c. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
 - d. Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat.
- 3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Kesejahteraan Keluarga.
 - b. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina ketahanan remaja, bina keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor).
 - c. Rendahnya peningkatan jumlah keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.
 - d. Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.
 - e. Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah.
- 4) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
- a. Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
 - b. Masalah utama yang dihadapi sektor keluarga berencana adalah, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS. Penyebab terbatasnya kualitas SDM aparatur dikarenakan kurangnya pelatihan penyuluhan.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini dimulai dengan uraian visi, misi dan program Kepala Daerah. Visi Pembangunan Lampung Tengah yang akan diwujudkan adalah:

"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial, budaya masyarakat

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan kekuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan
4. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai, serta kondusif guna peningkatan investasi daerah
5. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik (Governance)

Visi, Misi OPD, merupakan konsekuensi logis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, sebagai acuan untuk menjalankan program dan kegiatan, juga dapat berperan sebagai alat kendali untuk dijadikan tolak ukur melaksanakan tugas lima tahun ke depan, serta dapat mencapai visi, misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan baik.

Untuk mendorong suksesnya visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah mencanangkan misi OPD DPPKB yaitu: **“Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial, budaya masyarakat”**.

Bertolak dari misi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah merumuskan Rencana Kerja yang sistematis, terukur dan akuntabel yang secara rinci sebagai berikut:

Tujuan :

Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran :

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana

3. Penentuan Isu-Isu strategis

Issue strategis yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dalam mengemban misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya kesertaan ber-KB dari pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti IMP sebesar 18.547 orang, KB suntik sebesar 72.913 orang, dan KB PIL sebesar 17.086 orang, dari 118.651 peserta KB aktif. Kontribusi terbesar peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi hormonal ini memicu terjadinya kehamilan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
- b. Masih rendahnya stimulus yang diberikan kepada Institusi Masyarakat Pedesaan dalam operasional program KB di tingkat lini lapangan, dapat menghambat mekanisme operasional secara keseluruhan.
- c. Masih belum optimalnya sarana maupun prasarana terhadap bina keluarga dalam memberikan edukasi dan KIE kepada masyarakat.
- d. Masih belum optimalnya akses permodalan pada kelompok kegiatan peningkatan pendapatan keluarga.

Dari issue diatas, dalam bidang Keluarga Berencana terdapat beberapa aspek yang harus dapat dilembagakan, yaitu :

- Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB.
- Menata kembali program KB.
- Memperkuat sumber daya manusia.
- Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program KB.
- Meningkatkan Pembiayaan program KB.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4 (TC.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	4.412.082.922	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	100%	4.412.082.922	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	7 dokumen	9.882.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai Peraturan perundang- undangan yang berlaku	7 dokumen	9.882.500	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	4.882.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	4.882.500	Dinas PP dan KB

2	14	01	2.01	XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	5.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	5 dokumen	3.973.439.922	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	5 dokumen	3.973.439.922	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PP dan KB	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	30 orang	3.529.032.122	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PP dan KB	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	30 orang	3.529.032.122	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PP dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	439.407.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PP dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	439.407.800	Dinas PP dan KB
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	3 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	3 laporan	5.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	10 jenis	71.610.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	10 jenis	71.610.500	Dinas PP dan KB

2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PP dan KB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	1.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PP dan KB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	1.200.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PP dan KB	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PP dan KB	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	35.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Dinas PP dan KB	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 paket	1.336.000	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Dinas PP dan KB	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 paket	1.336.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PP dan KB	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	5.446.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PP dan KB	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	5.446.500	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah lapoaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 laporan	28.628.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah lapoaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 laporan	28.628.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12 bulan	57.720.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12 bulan	57.720.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 laporan	57.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 laporan	57.720.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Dinas PP dan KB	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	109 unit	291.930.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Dinas PP dan KB	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	109 unit	291.930.000	Dinas PP dan KB

2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PP dan KB	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	105 unit	271.210.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PP dan KB	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	105 unit	271.210.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PP dan KB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	5.720.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PP dan KB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	5.720.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dinas PP dan KB	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dinas PP dan KB	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	XX		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaiannya	36 pegawai	7.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaiannya	36 pegawai	7.500.000	Dinas PP dan KB
2	14	01	XX	XX	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PP dan KB	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 pegawai	7.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PP dan KB	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 pegawai	7.500.000	Dinas PP dan KB
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Dinas PP dan KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19)	18%	227.000.000	Program Pengendalian Penduduk	Dinas PP dan KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19)	18%	227.000.000	Dinas PP dan KB
							Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21%	-			Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21%	-	-
							Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	83%	-			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	83%	-	-

							Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	83%	-			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	83%	-	-
2	14	02	2.01		Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	Jumlah kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten yang disusun	1 perda	80.000.000	Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	Jumlah kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten yang disusun	1 perda	80.000.000	Dinas PP dan KB
						-	Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	2 perda	-		-	Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	2 perda	-	-
						-	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	150 dokumen kerjasama	-		-	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	150 dokumen kerjasama	-	-
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Dinas PP dan KB

2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	3 dokumen	30.000.000	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	3 dokumen	30.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	3 sektor	147.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0.97	147.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Kecamatan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang dirumuskan	1 laporan	25.000.000	Perumusan Parameter Kependudukan	Kecamatan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang dirumuskan	1 laporan	25.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kecamatan	Jumlah Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	28 dokumen	20.000.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kecamatan	Jumlah Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	28 dokumen	20.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	102.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kecamatan	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	102.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana	-	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	80%	4.567.826.500	Program Pembinaan Keluarga Berencana	-	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	80%	4.567.826.500	Dinas PP dan KB
						-	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	95,8%	-		-	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	95,8%	-	-

						-	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	83%	-		-	-			
						-	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	6.87%	-		-	-			
						-	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	39.95%	-		-	-			
						-	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	95%	-		-	-			
						-	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	91.26%	-		-	-			
						-	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	85%	-		-	-			
						-	Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	0.51%	-		-	-			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	-	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	500 orang	1.556.750.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	-	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	500 orang	1.556.750.000	Dinas PP dan KB

						-	Jumlah kelompok kerja KKBPK Kabupaten yang terbentuk	-			-	Jumlah kelompok kerja KKBPK Kabupaten yang terbentuk	-		-
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 organisasi	80.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kecamatan	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 organisasi	80.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	2 dokumen	150.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	Kecamatan	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	2 dokumen	150.000.000	Dinas PPKB
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	364.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kecamatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	364.000.000	Dinas PP dan KB

2	14	03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional da Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	6 laporan	882.750.000	Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional da Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	6 laporan	882.750.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	1 laporan	80.000.000	Pengendalian Program KKBPK (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	1 laporan	80.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%	1.406.600.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%	1.406.600.000	Dinas PP dan KB
						-	Presentase penyuluh KB yang telah mendapat dukungan sarana dan prasarana	100%			-	Presentase penyuluh KB yang telah mendapat dukungan sarana dan prasarana	100%		-
2	14	03	2.02	02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB	20 unit	360.000.000	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Kecamatan	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB	20 unit	360.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kecamatan	Jumlah laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan	3 laporan	30.000.000	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kecamatan	Jumlah laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga	3 laporan	30.000.000	Dinas PP dan KB

							Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)					Berencana (PKB/ PLKB)			
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	Kecamatan	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	1244 orang	1.016.600.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	Kecamatan	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	1244 orang	1.016.600.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	84 faskes	911.834.000	Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	-	911.834.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK BOKB)	Faskes	Jumlah laporan Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	45.830.500	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	Jumlah laporan Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	45.830.500	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4820 orang	680.503.500	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4820 orang	680.503.500	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (retensi)	Kecamatan	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 balai	97.600.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kecamatan	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 balai	97.600.000	Dinas PP dan KB

2	14	03	2.03	08	Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK BOKB)	Faskes	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 laporan	87.900.000	Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK BOKB)	Faskes	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 laporan	87.900.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%	692.642.500	Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%	692.642.500	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB	43 kampung	675.500.000	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB (DAK BOKB)	Kecamatan	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di Kampung KB	43 kampung	675.500.000	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu kampung KB	Kecamatan	Jumlah Laporan hasil pembinaan terpadu Kampung KB	3 laporan	17.142.500	Pembinaan Terpadu kampung KB	Kecamatan	Jumlah Laporan hasil pembinaan terpadu Kampung KB	3 laporan	17.142.500	Dinas PP dan KB
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	-	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%	5.314.000.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	-	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%	5.314.000.000	Dinas PP dan KB
						-	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	98.37%	-		-	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	98.37%	-	-
						-	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	96.25%	-		-	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	96.25%	-	-

						-	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	98.30%	-		-	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	98.30%	-	-
						-	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%	-		-	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%	-	-
						-	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	92.34%	-		-	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	92.34%	-	-
						-	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	92.28%	-		-	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	92.28%	-	-
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	5.314.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	5.314.000.000	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02	02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 unit	40.000.000	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kecamatan	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 unit	40.000.000	Dinas PP dan KB

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, didasarkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.5 (TC.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan Penting
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	80%	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun	-	Dinas PP dan KB

2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	5 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PP dan KB	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	30 orang	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PP dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	3 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	10 jenis	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PP dan KB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakankantor	2 paket	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas PP dan KB	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Dinas PP dan KB	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 paket	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PP dan KB	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PP dan KB	Jumlah lapoaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	12 bulan	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PP dan KB	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Dinas PP dan KB	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	109 unit	Dinas PP dan KB

2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PP dan KB	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	105 unit	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PP dan KB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Dinas PP dan KB	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	Dinas PP dan KB
2	14	01	XX		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya	36 pegawai	Dinas PP dan KB
2	14	01	XX	XX	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas PP dan KB	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 pegawai	Dinas PP dan KB
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Dinas PP dan KB	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19)	18%	Dinas PP dan KB
							Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	21%	-
							Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	83%	-
							Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	83%	-
2	14	02	2.01		Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	Jumlah kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten yang disusun	1 perda	Dinas PP dan KB
						-	Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	2 perda	-

						-	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	150 dokumen kerjasama	-
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Dinas PP dan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/Kota	1 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	sekolah	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	3 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Kecamatan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang dirumuskan	1 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kecamatan	Jumlah dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	28 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kecamatan	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana	-	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	80%	Dinas PP dan KB
						-	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	95,8%	-
						-	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	83%	-
						-	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	6.87%	-

						-	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	39.95%	-
						-	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	95%	-
						-	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	91.26%	-
						-	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	85%	-
						-	Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	0.51%	-
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	-	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	500 orang	Dinas PP dan KB
						-	Jumlah kelompok kerja KKBPK Kabupaten yang terbentuk	53 pokja	-
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra kerja	Kecamatan	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	5 organisasi	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Masa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	Kecamatan	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Masa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	2 dokumen	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kecamatan	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	Dinas PP dan KB

2	14	03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Kecamatan	Jumlah laporan hasil Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	6 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%	Dinas PP dan KB
						-	Presentase penyuluh KB yang telah mendapat dukungan sarana dan prasarana	100%	-
2	14	03	2.02	02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Kecamatan	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	20 unit	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kecamatan	Jumlah laporan hasil Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Persediaan (IMP)	Kecamatan	Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader Institusi Masyarakat perdesaan (IMP)	1244 orang	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	-	Dinas PP dan KB

2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	Jumlah Laporan pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	4820 orang	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Retensi)	Kecamatan	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	3 unit	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03	08	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 laporan	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB		Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB	100%	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kecamatan	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kampung KB	43 kampung	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu kampung KB	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	04	2.01		Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	-	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%	Dinas PP dan KB
						-	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	98.37%	-

						-	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	96.25%	-
						-	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	98.30%	-
						-	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%	-
						-	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	92.34%	-
						-	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	92.28%	-
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Dinas PP dan KB
2	14	04	2.01	01	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/UPPKS)	Kecamatan	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKLPK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dibentuk	4 kelompok	Dinas PP dan KB
2	14	04	2.01	03	Orientasi/ pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kecamatan	Jumlah laporan Hasil orientasi dan Pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	6 laporan	Dinas PP dan KB
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Kecamatan	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	2490 orang	Dinas PP dan KB

2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kecamatan	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	16 laporan	Dinas PP dan KB
---	----	----	------	----	--	-----------	---	------------	-----------------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan potensi, kondisi, tantangan dan peluang dalam melaksanakan pembangunan yang di hadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu komitmen yang kuat guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas kependudukan yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas perkembangan kependudukan masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan masih rendahnya stimulus yang diberikan kepada Institusi Masyarakat Pedesaan dalam operasional program KB di tingkat lini lapangan, dapat menghambat mekanisme operasional secara keseluruhan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tersebut, maka diharapkan perkembangan kependudukan dapat tumbuh dengan seimbang. Bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan kualitas keluarga serta persebaran penduduk untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas penduduk, maka Keluarga Berencana menjadi salah satu pilihan alat bantu dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, melalui

pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Perencanaan dalam menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan, melibatkan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Kendala yang dihadapi adalah, kurangnya partisipasi dari berbagai komponen kegiatan yang meliputi berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri, peraturan perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan di tingkat pusat maupun daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan misi yang ke 1 yaitu pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,97	0,87	0,77	0,67	0,57	0,47
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52,47	54,38	56,29	58,20	60,11	62,02

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah, kumpulan kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil OPD untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program yang dipilih merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah. Program ini selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Kegiatan adalah, tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Berikut ini adalah Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah periode 2021-2026 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

1) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- d. Penyediaan Peralatan rumah tangga
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan :

1) Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan kesertaan KB pria

- b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya
 - e. Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- 2) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal
- Sub Kegiatan :
- a. Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK
 - b. Promosi dan KIE program KKBPK melalui massa, cetak dan elektronik serta media luar ruangan
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - d. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan mitra kerja
 - e. Pengendalian Program KKBPK
- 3) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB
 - b. Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
 - c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)
- 4) Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
- Sub Kegiatan :
- a. Pembinaan Terpadu kampung KB

- b. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/UPPKS)
- b. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)
- c. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
- d. Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)

4. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

- 1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Parameter Kependudukan
- b. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
- c. Pengolahan dan pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

- 2) Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

b. Penyediaan dan Pengembangan mataeri pendidikan
Kependudukan jalur pendidikan formal sesuai lokal
Kabupaten/Kota

Tabel 3.2 (TC.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lampung Tengah

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku		100%	4.412.079.922			100%	4.621.034.122
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas PP dan KB	7 dokumen	9.882.500	APBD		7 dokumen	15.000.000
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas PP dan KB	7 dokumen	4.882.500	APBD		7 dokumen	10.000.000

2	14	01	2.01	XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas PP dan KB	2 laporan	5.000.000 -	APBD		1 dokumen	5.000.000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	Dinas PP dan KB	5 dokumen	3.973.439.922	APBD		100%	3.998.714.122
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PP dan KB	12 bulan	3.529.032.122	APBD		12 bulan	3.529.032.122
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	Dinas PP dan KB	24 jenis	439.407.800	APBD		24 jenis	454.682.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trieulanan/Semesteran SKPD	Dinas PP dan KB	3 laporan	5.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Dinas PP dan KB	10 jenis	71.610.500	APBD		100%	196.500.000
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PP dan KB	2 paket	1.200.000	APBD		20 jenis	6.500.000

2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PP dan KB	4 paket	35.000.000	APBD		65 unit	60.000.000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas PP dan KB	10 paket	1.336.000	APBD		30 jenis	10.000.000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PP dan KB	9 paket	5.446.500	APBD		9 jenis	20.000.000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD	Dinas PP dan KB	18 laporan	28.628.000	APBD		684 orang	100.000.000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Dinas PP dan KB	12 bulan	57.720.000	APBD		12 bulan	57.720.000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas PP dan KB	12 laporan	57.720.000	APBD		12 laporan	57.720.000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	Dinas PP dan KB	109 unit	291.930.000	APBD		109 unit	340.600.000
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas PP dan KB	105 unit	271.210.000	APBD		105 unit	289.010.000
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas PP dan KB	10 unit	5.720.000	APBD		18 unit	11.650.000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas PP dan KB	1 unit	15.000.000	APBD		1 unit	40.000.000

2	14	01	XX		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya	Dinas PP dan KB	36 pegawai	7.500.000	APBD		36 pegawai	12.500.000
2	14	01	XX	XX	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas PP dan KB	3 pegawai	7.500.000	APBD		5 pegawai	12.500.000
2	14	X X	XX		Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate/ASFR 15-19)	Dinas PP dan KB	18%	227.000.000	APBD + DAK		20%	262.000.000
						Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	-	21%	-	-		21%	-
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	83%	-	-		69.44%	-
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	83%	-	-		69.44%	-
2	14	X X	XX		Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten yang disusun	80.000.000	1 perda	-	-		1 perda	80.000.000

						Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	-	2 perda	-	-		2 perda	-
						Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	150 dokumen kerjasama	-	-		50 dokumen kerjasama	-
					Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
2	14	X X	XX	XX	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	Kecamatan	3 dokumen	30.000.000	APBD		3 dokumen	30.000.000
2	14	X X	XX		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	3 sektor	147.000.000	-		3 sektor	182.000.000
2	14	X X	XX	XX	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah laporan Perumusan Parameter Kependudukan	Kecamatan	1 laporan	25.000.000	APBD		1 laporan	30.000.000
2	14	X X	XX	XX	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kecamatan	28 dokumen	20.000.000	APBD		28 dokumen	50.000.000

					Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kecamatan	1 dokumen	102.000.000	DAK		1 dokumen	102.000.000
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		80%	4.567.826.500	APBD		75%	4.567.826.500
					Persentase fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	95,8%	-	-			100%	-
					Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	-	83%	-	-			73%	-
					Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	-	6.87%	-	-			6.84%	-
					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	39.95%	-	-			39.92%	-
					Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-	95%	-	-			100%	-
					Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	91.26%	-	-			91.23%	-
					Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	-	85%	-	-			83%	-

						Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	-	0.51%	-	-		0.46%	-
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		500 orang	1.556.750.000			500 orang	1.556.750.000
						Jumlah kelompok kerja KKBPK Kabupaten yang terbentuk		53 Pokja				53 pokja	
					Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan mitra kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan mitra kerja	Kecamatan	5 Organisasi	80.000.000	DAK		5 Organisasi	80.000.000
2	14	03	2.01	XX	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	Kecamatan	2 dokumen	150.000.000	DAK		2 dokumen	150.000.000
2	14	03	2.01	C C	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kecamatan	1 laporan	364.00.000	DAK		1 laporan	364.000.000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil Pengelolaan operasional dan sarana di balai Penyuluhan KKBPK	Kecamatan	6 laporan	882.750.000	DAK		6 laporan	882.750.000
					Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPK	Kecamatan	1 laporan	80.000.000	DAK		1 laporan	80.000.000

2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB		100%	1.406.600.000			100%	1.406.600.000
						Presentase penyuluh KB yang telah mendapat dukungan sarana dan prasarana		100%				100%	-
2	14	03	2.02	02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Kecamatan	20 unit	360.000.000	DAK		20 unit	360.000.000
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Jumlah laporan hasil Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Kecamatan	3 laporan	30.000.000	APBD		3 laporan	30.000.000
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP)	Kecamatan	1244 orang	1.016.600.000	DAK		1244 orang	1.016.600.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi		84 Faskes	911.834.000			84 Faskes	911.834.000

					Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Faskes	1 laporan	45.830.500	DAK		1 laporan	45.830.000
2	14	03	2.03		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kecamatan	4820 orang	680.503.500	DAK		4820 orang	680.503.500
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana Penunjang Pelayanan KB	Kecamatan	3 balai	97.600.000	APBD		3 balai	97.600.000
2	14	03	2.03		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Faskes	2 laporan	87.900.000	DAK		2 laporan	87.900.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB		100%	692.642.500			100%	692.642.500
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kecamatan	43 kampung	675.500.000	DAK		43 kampung	675.500.000
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu kampung KB	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu kampung KB	Kecamatan	3 laporan	17.142.500	APBD		3 laporan	17.142.500

2	14	X X			Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		100%	5.314.000.000	APBD		100%	5.314.000.000
						Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	98.37%	-	-		98.34%	-
						Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	96.25%	-	-		96.22%	-
						Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	98.30%	-	-		98.27%	-
						Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	-	100%	-	-		100%	-
						Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	92.34%	-	-		92.31%	-
						Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	92.28%	-	-		92.25%	-
2	14	X X	XX		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	100%	5.314.000.000	-		100%	5.314.000.000

2	14	X X	XX	XX	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/UPPKS)	Kecamatan	4 unit	40.000.000	APBD		4 unit	40.000.000
2	14	X X	XX	XX	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kecamatan	16 laporan	20.000.000	APBD		16 laporan	20.000.000
2	14	X X	XX	XX	Orientasi/ pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi/ pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kecamatan	6 laporan	25.000.000	APBD		6 laporan	25.000.000
2	14	X X	XX	XX	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS)	Kecamatan	2490 orang	5.229.000.000	DAK		2490 orang	5.229.000.000
TOTAL									14.520.906.422				14.764.860.622

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Ket
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
2	14	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku		100%	4.440.444.922		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas PP dan KB	7 dokumen	9.882.500	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PP dan KB	7 dokumen	4.882.500	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.01	XX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PP dan KB	3 laporan	5.000.000	APBD	Dinas PP dan KB

2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen keuangan yang disusun	Dinas PP dan KB	5 Dokumen	3.973.439.922	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas PP dan KB	30 orang	3.529.032.122	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas PP dan KB	10 Dokumen	439.407.800	APBD	Dinas PP dan KB
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dinas PP dan KB	3 laporan	5.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	Dinas PP dan KB	10 jenis	71.610.500	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas PP dan KB	4 paket	1.200.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PP dan KB	6 paket	35.000.000	APBD	Dinas PP dan KB

2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas PP dan KB	10 paket	1.336.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PP dan KB	9 paket	5.446.500	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD	Dinas PP dan KB	18 laporan	28.628.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Dinas PP dan KB	12 bulan	57.720.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Dinas PP dan KB	12 laporan	57.720.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan	Dinas PP dan KB	115 unit	291.930.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Dinas PP dan KB	95 unit	271.210.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Dinas PP dan KB	10 unit	5.720.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dinas PP dan KB	1 unit	15.000.000	APBD	Dinas PP dan KB

2	14	01	XX		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah melengkapi berkas kepegawaianya	Dinas PP dan KB	36 Orang	7.500.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	01	XX	XX	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas PP dan KB	4 Orang	7.500.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX		Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifik Fertility rate/ASFR 15-19)	Dinas PP dan KB	18%	277.000.000	APBD+DAK	Dinas PP dan KB
						Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun	-	21%	-	-	-
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	83%	-	-	-
						Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	83%	-	-	-
2	14	XX	XX		Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten yang disusun	-	1 perda	80.000.000	-	Dinas PP dan KB

						Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk	-	2 perda	-	-	-
						Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	150 dokumen kerjasama	-	-	-
2	14	XX	XX	XX	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten	1 dokumen	50.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX	XX	Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan Formal sesuai Isu lokal Kabupaten/Kota	Kecamatan	30 dokumen	30.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	0.97	147.000.000	-	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX	XX	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan parameter kependudukan yang dirumuskan	Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	APBD	Dinas PP dan KB

2	14	XX	XX	XX	Penyediaan dan Pengolahan data kependudukan	Jumlah Penyediaan dan Pengolahan data kependudukan	Kecamatan	28 dokumen	20.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX	XX	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kecamatan	1 dokumen	102.000.000	DAK	Dinas PP dan KB
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		80%	4.567.826.500	DAK	Dinas PP dan KB
						Persentase fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	95,8%	-	-	-
						Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	-	83%	-	-	-
						Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	-	6.87%	-	-	-
						Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	39.95%	-	-	-
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-	95%	-	-	-

						Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	91.26%	-	-	-
						Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	-	85%	-	-	-
						Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran PBI	-	0.51%	-	-	-
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		500 Orang	1.556.750.000		Dinas PP dan KB
						Jumlah kelompok kerja KKBPK Kabupaten yang terbentuk		-			-
2	14	03	2.01	XX	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapat Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Dinas PPKB	5 organisasi	80.000.000	DAK	Dinas PP dan KB
					Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta Media Luar Ruangan	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta Media Luar Ruangan	Dinas PPKB	5 dokumen	150.000.000	DAK	

					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	28 kecamatan	1 laporan	364.000.000	DAK	
					Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	21 Balai Penyuluhan KB Kecamatan	6 laporan	882.750.000	DAK	
					Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan hasil pengendalian program KKBPK	Dinas PPKB	1 Laporan	80.000.000	DAK	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB		100%	1.406.600.000		Dinas PP dan KB
						Presentase penyuluh KB yang telah mendapat dukungan sarana dan prasarana		100%			-
2	14	03	2.02	02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	Kecamatan	3 unit	360.000.000	DAK	Dinas PP dan KB

2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kecamatan	65 orang	30.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kecamatan	1.244 orang	1.016.600.000	DAK	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota	Angka CPR			911.834.000		Dinas PP dan KB
					Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Faskes	1 laporan	45.830.500	DAK	
2	14	03	2.03		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kecamatan	4.820 orang	680.503.500	DAK	Dinas PP dan KB
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Retensi)	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	Kecamatan	3 balai	97.600.000	APBD	Dinas PP dan KB

					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	3 laporan	87.900.000	DAK	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Presentase meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh KB		100%	692.642.500		Dinas PP dan KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Kecamatan	43 kampung	675.500.000	DAK	
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu kampung KB	Jumlah kampung yang mendapat pembinaan	Kecamatan	3 kampung	17.142.500	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	XX			Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		100%	5.314.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
						Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	98.37%	-	-	-
						Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	96.25%	-	-	-
						Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	98.30%	-	-	-

						Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	-	100%	-	-	-
						Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	92.34%	-	-	-
						Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	92.28%	-	-	-
2	14	XX	XX		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	100%	5.314.000.000	-	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX	XX	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomu Keluarga/ UPPKS)	Kecamatan	20 unit	40.000..000	APBD	Dinas PP dan KB

2	14	XX	XX	XX	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah laporan hasil Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kecamatan	5 laporan	20.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX	XX	Orientasi/ pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi/ pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kecamatan	1 laporan	25.000.000	APBD	Dinas PP dan KB
2	14	XX	XX	XX	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kecamatan	2.490 orang	5.229.000.000	DAK	Dinas PP dan KB
TOTAL									14.520.906.422		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



dr. LIDIA DEWI

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19770303 200501 2 016